

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, termasuk perkembangan internet. Salah satu manifestasi dari perkembangan ini adalah penyajian informasi melalui internet. Internet memungkinkan informasi disajikan dengan lebih efisien dan efektif, salah satunya melalui situs web (*website*). *Website* merupakan media informasi yang menyimpan data di server web dan diakses melalui internet. Menurut Goutam & Tiwari (2019), metodologi pengujian penetrasi pada aplikasi web adalah salah satu cara untuk memastikan keamanan dan kinerja dari website tersebut. *Website* adalah media yang terdiri dari beberapa halaman yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menampilkan informasi dalam bentuk gambar, teks, suara, atau gabungan dari ketiganya. *Website* bersifat multi-platform, artinya dapat diakses dari berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Meskipun teknologi ini sudah lama digunakan, banyak perusahaan masih menggunakan *website* untuk menampilkan profil perusahaan mereka (*company profile*). Menurut Abdulloh (2018:2), aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat memproses data dan menghasilkan informasi yang sesuai.

Kementerian Perhubungan adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perhubungan (transportasi). Tugas tersebut mencakup penyediaan jasa layanan, prasarana, dan sarana perhubungan. Pemerintah, sebagai penyedia layanan publik, harus bertanggung jawab dan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kinerja organisasi yang baik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik yang mengutamakan kepuasan masyarakat.

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terus berupaya memastikan terselenggaranya pelayanan transportasi laut yang

andal dan berdaya saing. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi di industri pelayaran. Melalui aplikasi berbasis web seperti SIMLALA memberikan kemudahan bagi pengguna layanan untuk mengajukan permohonan layanan publik secara online, yang berarti pemantauan proses permohonan, serta mewujudkan layanan publik yang standar dan transparan. Pelayanan perizinan berbasis web memberikan kemudahan bagi perusahaan dan masyarakat, menghemat waktu dan energi dalam pengurusan izin, serta mengurangi potensi korupsi dan pungutan liar.

Pelayanan yang sudah berjalan melalui SIMLALA meliputi berbagai layanan, seperti SIUPAL (PMA/PMDN) SIUPKK, spesifikasi kapal, pembukaan cabang, RPK linier dan tramper, serta RPK khusus., Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing, Penambahan Pelabuhan, Tambah Urgensi, serta Omisi dan Deviasi. Pelayanan ini telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan secara elektronik dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). Izin usaha ini diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota, melalui sistem terpadu yang ditujukan kepada pelaku perekonomian.

PKKA (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing) merupakan syarat berupa surat yang didapat dari sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Surat ini diperlukan saat agen pelayaran (baik General Agent maupun Local Agent) bertugas mengageni kapal asing di pelabuhan Indonesia atau ditunjuk oleh pemilik kapal untuk menjalankan tugas tersebut. Perusahaan keagenan kapal membantu agen yang ada di Indonesia untuk mengurus surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing.

Diperlukan banyak dokumen untuk pembuatan surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing, seperti *Crew List*, Q88, IOPP, SSO, dan lainnya. Setelah semua dokumen persyaratan lengkap, *General Agent* (GA) langsung mengunggahnya pada aplikasi SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Lalu

Lintas Angkutan Laut) dan menunggu proses lebih lanjut oleh petugas pemeriksa. Hambatan-hambatan sering kali terjadi, seperti kurangnya kelengkapan dokumen karena adanya dokumen yang sudah tidak berlaku, (Winoto Hadi,2024) konsep manajemen waktu meningkatkan proses kecepatan waktu serta waktu penyelesaian yang lama karena pengajuan permohonan aplikasi belum diproses oleh pemeriksa setelah disubmit pada aplikasi SIMLALA. Faktor lain yang menyebabkan lamanya proses adalah adanya revisi atau catatan dari pemeriksa yang belum dikerjakan oleh perusahaan karena dokumen yang diminta belum siap, sehingga permohonan belum bisa dilanjutkan.

Namun, hambatan-hambatan sering kali terjadi dalam proses pengajuan dokumen melalui aplikasi SIMLALA. Beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi kurangnya kelengkapan dokumen karena dokumen yang sudah tidak berlaku, waktu penyelesaian yang lama akibat permohonan aplikasi belum diproses oleh pemeriksa, serta revisi dokumen yang membutuhkan waktu tambahan. Selain itu, keterbatasan ukuran unggahan dokumen sering kali menyebabkan dokumen menjadi pecah atau blur sehingga tidak terbaca oleh pemeriksa. Pemeliharaan aplikasi SIMLALA, ketergantungan pada jaringan internet, dan error sistem juga menjadi tantangan dalam pengajuan surat PKKA.

Sebagai perusahaan Pengguna Jasa Pelayanan di bidang angkutan laut siap dan mampu mengurus kapal dioperasikan di pelabuhan dengan memanfaatkan sistem informasi. Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Dengan sistem ini, perusahaan merupakan salah satu penyedia jasa yang mendukung kelancaran proses kedatangan dan keberangkatan kapal. di pelabuhan. Hambatan lain juga ditemukan saat perusahaan mengunggah dokumen sertifikat, seperti keterbatasan ukuran unggahan dokumen yang menyebabkan dokumen harus dikompresi. Hal ini dapat menyebabkan dokumen terlihat pecah atau blur, sehingga tidak terbaca oleh pemeriksa dan menghambat proses verifikasi. Selain itu, sering terjadi pemeliharaan aplikasi SIMLALA, ketergantungan pada jaringan internet, dan error sistem yang menyebabkan pengajuan surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing terhambat. Banyak badan usaha kesulitan dalam permohonan perizinan karena kurangnya pemahaman atas peraturan- peraturan

yang berlaku.

Selain itu, permasalahan terkait kelancaran proses distribusi barang di sektor transportasi laut juga menjadi perhatian. Penelitian oleh (Winoto Hadi, (2022) dalam Jurnal Penelitian Transportasi Laut mengungkapkan bahwa keterlambatan pengeluaran barang impor di lapangan penumpukan wilayah 2 Terminal Multipurpose PT Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor teknis dan faktor administrasi. Faktor teknis mencakup keterlambatan trucking, padatnnya traffic di area pelabuhan, gangguan pada sistem autogate dan jaringan, buruknya cuaca, serta besarnya biaya penumpukan akibat lamanya waktu timbun. Faktor administrasi mencakup kurang tanggapnya importir dalam melengkapi dokumen impor, pengurusan barang impor jalur merah, proses penerbitan dokumen SPPB, serta barang impor yang sudah memiliki SPPB tetapi belum dikeluarkan dari lapangan penumpukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor teknis menyumbang 51,52% keragaman data, sementara faktor administrasi menyumbang 28,45%.

Sebagai perusahaan Keagenan Kapal Asing siap dan mampu mengurus kapal yang dioperasikan di pelabuhan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Dengan sistem ini, perusahaan menjadi salah satu penyedia jasa yang memudahkan proses kedatangan dan keberangkatan kapal di pelabuhan. Hambatan lain juga ditemukan saat perusahaan mengunggah dokumen sertifikat, seperti keterbatasan ukuran unggahan dokumen yang menyebabkan dokumen harus dikompresi. Hal ini dapat menyebabkan dokumen terlihat pecah atau blur, sehingga tidak terbaca

oleh pemeriksa dan menghambat proses verifikasi. Selain itu, sering terjadi pemeliharaan aplikasi SIMLALA, ketergantungan pada jaringan internet, dan error sistem yang menyebabkan pengajuan surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing terhambat. (Winoto Hadi, 2022) Pelayanan bagi kapal yang singgah di wilayah pelabuhan indonesia Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam proses pengajuan izin. karena kurangnya pemahaman atas peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis pengaruh penerapan aplikasi SIMLALA terhadap proses persetujuan keagenan kapal asing (PKKA) dalam penulisan skripsi sarjana terapan ini dengan judul "Pengaruh Penerapan Aplikasi SIMLALA Terhadap Proses Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Di Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan."

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan aplikasi SIMLALA?
2. Bagaimana proses Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)?
3. Seberapa besar pengaruh penerapan aplikasi SIMLALA terhadap Proses Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam menyusun tujuan penelitian, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik yang menggambarkan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan aplikasi SIMLALA.
2. Menganalisis proses Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).
3. Menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan aplikasi SIMLALA terhadap proses Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan penting yang dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Kegunaan penelitian ini meliputi aspek akademis, praktis, dan kebijakan. Berikut adalah rincian dari kegunaan tersebut:

### 1. Kegunaan Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait dengan penerapan teknologi informasi di sektor maritim, khususnya dalam konteks pelayanan publik di bidang transportasi laut. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aplikasi SIMLALA dan pengaruhnya terhadap proses persetujuan keagenan kapal asing.
- b. Penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan teori mengenai manajemen layanan publik berbasis teknologi, dengan menambah wawasan mengenai efektivitas aplikasi berbasis web dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan di sektor maritim.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja aplikasi SIMLALA. Dengan memahami pengaruh SIMLALA terhadap proses persetujuan keagenan kapal asing, kementerian dapat mengidentifikasi kendala yang ada dan mencari solusi untuk memperbaiki layanan publik yang mereka tawarkan.
- b. Bagi perusahaan pelayaran dan agen keagenan kapal, penelitian ini dapat memberikan panduan dalam memanfaatkan aplikasi SIMLALA secara optimal untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan yang mungkin terjadi. Pengetahuan ini penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko keterlambatan dalam proses keagenan kapal.

### 3. Kegunaan Kebijakan

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan regulasi dan kebijakan terkait dengan penerapan teknologi informasi di sektor transportasi laut. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbarui atau menyempurnakan peraturan dan kebijakan yang mengatur sistem perizinan online seperti SIMLALA, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung efisiensi industri pelayaran.
- b. Penelitian ini juga dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan strategi untuk mendorong adopsi teknologi yang lebih luas di sektor maritim, guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri transportasi laut Indonesia di era digital.

